

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada satu sisi mahasiswa menjadi kelompok kepentingan di dalam struktur politik negara demokrasi<sup>1</sup>, di sisi lain mahasiswa berperan dalam memecahkan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat. Menurut Knopfemacher, mahasiswa sebagai insan-insan calon sarjana yang keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik dan diharapkan menjadi calon-calon intelektual. Dengan demikian, mahasiswa memiliki tanggung jawab lebih dengan diiringi ribuan harapan yang ada pada pundak dan idealismenya, sementara itu dalam pandangan awam mahasiswa diasumsikan menjadi penyambung lidah bagi masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih baik (*Agent Of Change*) (Hadijaya, 2015).

Sebagai kelompok yang memiliki peran dalam membangun *civil cociety*<sup>2</sup>, maka mahasiswa diharapkan memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian yang dilakukan dengan cara vertikal maupun horizontal<sup>3</sup>. Individu dalam gerakan *civil society* merupakan individu/kelompok yang bebas dan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa dalam teori politik merupakan kelompok kepentingan (infrastruktur politik) yang memiliki peran menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah (suprastruktur politik). (Rismawan, 2017)

<sup>2</sup>*Civil Society* adalah hubungan yang sedemikian rupa antara masyarakat dan negara, masyarakat *civil society* adalah masyarakat yang akan ketergantungan negara dan pasar.

<sup>3</sup> Kontribusi vertikal yaitu kontribusi melalui struktur formal, seperti penyampaian aspirasi kepada pemerintah, memberikan usulan akademis dll. Kontribusi horiontal yaitu kontribusi yang dilakukan langsung ke masyarakat, seperti pemberdayaan masyarakat.

memiliki *self-reliance* (percaya diri) serta *self-supporting* (mandiri), percaya diri merupakan suatu keadaan di mana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi, sementara mandiri adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ketergantungan, jika kita berakar pada apa yang dijelaskan maka, mahasiswa memiliki peranan penting dalam gerakan *civil society* harus menggunakan potensinya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi (Damsar, 2010).

Menyambut harapan masyarakat untuk melengkapi kebutuhan intelektual, sosial, serta politiknya. Mahasiswa membutuhkan sebuah wadah bernaung dan mengembangkan diri dalam melihat, serta menyikapi realitas sosial yang terjadi, salah satunya melalui organisasi. Organisasi sebagai kesatuan sosial dari sekelompok individu, yang saling berinteraksi menurut pola yang terstruktur dengan cara tertentu dan setiap anggota mempunyai tugas dan fungsi yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dengan lingkungannya. Sesuai dengan definisi tersebut Mils dan Mills (2011) berpandangan bahwa organisasi merupakan kolektivitas manusia yang aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Fitriyyah, 2021).

Pada umumnya terdapat dua organisasi yang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mencari kebutuhan intelektualnya, yaitu organisasi internal dan organisasi eksternal. Sementara itu, organisasi internal berada di dalam Perguruan Tinggi (PT). Karena berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan, pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan di setiap perguruan tinggi terdapat

organisasi kemahasiswaan yang menaungi aktivitas kampus. Organisasi intra ini dibentuk di perguruan tinggi, fakultas ataupun jurusan, organisasi kemahasiswaan mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah menampung aspirasi.

Selain organisasi intra, terdapat juga organisasi eksternal yang berada di luar kampus, organisasi ini memiliki jaringan di tingkat lokal hingga nasional. Organisasi eksternal mahasiswa yang masih eksis hingga kini dalam memperjuangkan aspirasi dan gerakan mahasiswa antara lain, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Kemunculan organisasi eksternal dimulai sejak agresi militer Belanda ke-2 pada tahun 1947. Organisasi eksternal mahasiswa pertama kali dimulai oleh HMI di Yogyakarta. Pemicu munculnya organisasi eksternal *pertama*, situasi politik Indonesia yang kembali diserang oleh Belanda, sehingga mahasiswa yang tergabung di HMI berusaha turut memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. *Kedua*, situasi kampus yang sudah terkontaminasi oleh paham sekularisme Belanda, sehingga mahasiswa yang mayoritas Islam di Yogyakarta menganggap perlu mendirikan organisasi untuk meng-*counter* sekularisme yang disebarkan oleh Belanda (Sitompul, 2006; Sitompul, 2008).

Selain kehadiran HMI di Yogyakarta, ternyata organisasi eksternal terus bermunculan seperti PMKRI (1947), GMKI (1950), serta GMNI (1954) dan PMII

pada tahun 1960 . Kemunculan organisasi ini penting bagi mahasiswa pada saat itu karena memberi ruang untuk memperjuangkan aspirasi sosial dan politik di luar kampus yang kemudian bisa menjembatani kepentingan masyarakat dan negara.

Ketika memasuki era Pemerintahan Soeharto (1970–1998) organisasi eksternal mendapat tantangan baru, khususnya organisasi yang berasaskan Islam karena dianggap sebagai ancaman bagi pemerintahan Orde Baru, sehingga diberlakukan asas tunggal Pancasila melalui Undang-Undang (UU). No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melalui UU tersebut, organisasi eksternal mengalami tekanan politik menyikapi asas tunggal yang diterapkan Soeharto. Sehingga organisasi mahasiswa baik yang berideologi Islam ataupun non Islam mengalami pengebirian demokrasi selama pemerintahan sentralisme otoriter Soeharto (Muniruddin, 2017).

Setelah keruntuhan rezim Soeharto, pada tahun 1998 di era reformasi UU. No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dicabut melalui Tap MPR NO XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia pada saat pemerintahan Bacharudin Jusuf(B.J) Habibie. Artinya organisasi eksternal di Indonesia mendapatkan “angin segar” kebebasan berdemokrasi, sesuai dengan asas ideologi ketika awal organisasi itu terbentuk. Hanya saja, kebebasan berdemokrasi tidak bertahan lama yaitu hanya bertahan empat tahun. Karena pada tahun 2002 melalui Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (SK Dirjen Dikti) No 26 tahun 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai

Politik Dalam Kehidupan Kampus<sup>4</sup>, menyebabkan organisasi ekstra dilarang sepenuhnya berkegiatan di kampus. Dengan dikeluarkannya SK Dirjen Dikti tersebut dianggap mengebiri aspirasi dan demokrasi mahasiswa di era reformasi. Ruang gerak organisasi ekstra kampus menjadi sangat terbatas, padahal telah bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 huruf e ayat 3 yang menjelaskan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Karena itu pembatasan organisasi ekstra kampus oleh pemerintah mengundang polemik dari kalangan masyarakat dan mahasiswa, karena tidak sesuai dengan konstitusi.

Setelah belasan tahun kebebasan mahasiswa dibungkam oleh pemerintah dari tahun 2002. Pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi.<sup>5</sup> Pemerintah membuka kembali kebebasan berdemokrasi. Namun pemberlakuan kebijakan tersebut karena tingginya kasus mahasiswa yang terpapar radikalisme. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Tahun 2017 sebanyak 39% mahasiswa di 15 provinsi terpapar radikalisme. Organisasi

---

<sup>4</sup>Pemberlakuan SK Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2002 bertujuan menjaga suasana kampus agar kondusif dan jauh dari kepentingan politik, maka pemerintah melarang kader organisasi eksternal kampus atau partai politik membuka sekretariat dan perwakilannya di dalam kampus. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang memperbolehkan adanya kesekretariatan organisasi eksternal di kampus serta kader yang masih boleh menduduki jabatan di organisasi internal kampus.

<sup>5</sup> Pemberlakuan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 karena tingginya kasus mahasiswa yang terpapar radikalisme. Diizinkannya kembali organisasi eksternal berkegiatan di kampus sebagai upaya penangkalan radikalisme melalui pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pembinaan ideologi Pancasila. Namun demikian organisasi eksternal yang ingin berkegiatan di kampus harus berbentuk UKM Pembinaan Ideologi Pancasila.

eksternal dianggap bisa membantu pemerintah dalam menangkal radikalisme, asalkan sesuai dengan asas negara yakni Pancasila (Jdih.bnpt.go.id, 2017).

Walaupun terjadi pembungkaman selama 14 tahun oleh pemerintah, organisasi eksternal tetap konsisten melakukan gerakan – gerakan sosial - politik menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah. Konsistensi tersebut dapat dilihat dari gerakan yang dibuat oleh organisasi eksternal diberbagai daerah, misalnya demonstrasi besar penolakan kenaikan BBM tahun 2005 oleh HMI Cabang Ciputat, KAMMI, lalu demonstrasi oleh HMI tahun 2011 di Semarang dilakukan HMI dan PMII terkait pemberantasan korupsi dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian PMII tahun 2016 mengkritisi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Sementara itu sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini. Gerakan-gerakan organisasi eksternal juga dilakukan di Tasikmalaya, meskipun di wilayah ini berkembang organisasi eksternal, akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas gerakan–gerakan sosial yang dilakukan HMI dan PMII.

Momentum gerakan sosial paling lekat dalam ingatan mahasiswa Tasikmalaya adalah ketika HMI dan PMII bersama-sama dengan santri serta masyarakat, aktif ikut serta membela kaum santri dalam peristiwa Tasik Kelabu 1996<sup>6</sup>. Pada era reformasi HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya tetap saling

---

<sup>6</sup> Peristiwa Tasik Kelabu 1996 adalah peristiwa kelam yang terjadi di Jl. K.H Zaenal Mustofa antara kalangan santri dengan oknum Polisi, peristiwa bermula saat salah satu santri Riyadul Ulum diduga mencuri dan diberikan hukuman, santri yang orang tuanya adalah anggota polisi kemudian melapor kejadian tersebut, kejadian memanas pada saat tersiar kabar adanya penyiksaan guru pesantren oleh pihak polisi. Peristiwa tersebut mencapai puncaknya ketika para santri, ormas Islam seperti HMI dan PMII, dan beberapa ormas lain melakukan do'a bersama di Masjid Agung Tasikmalaya dan dialog dengan Kapolres Tasikmalaya, namun dialog yang dinantikan ternyata batal dilakukan hingga massa yang berkumpul mendatangi Polres Tasikmalaya dan terjadilah kerusuhan besar yang mengakibatkan korban tewas 4 orang dan 15 orang terluka. (Junaedi, 2021)

membersamai dengan mengawal berbagai isu yang berkembang, seperti pelantikan Wali Kota dan Wakil Walikota Tasikmalaya 2012, demonstrasi nasional RUU KPK 2019, pelantikan anggota DPRD Kota Tasikmalaya 2019, dan yang terbaru unjuk rasa kenaikan BBM September 2022.

Walaupun dalam banyak kasus gerakan HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya memiliki sikap yang sama, pada kasus-kasus tertentu memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan itu tercermin misalnya dalam penyikapan terkait isu lingkungan di Kota Tasikmalaya, pada tanggal 4 Oktober 2022 HMI menggelar Audiensi bersama Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya dan Dinas Lingkungan Hidup, rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya Enan Suherlan, A.Md., S. Th.I, S.H., M.M, sementara dalam sumber yang sama tepat empat bulan sebelumnya, PMII Cabang Tasikmalaya menyikapi dengan cara yang berbeda yaitu dengan menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada 7 Juni 2022 dengan membawa empat tuntutan terkait isu lingkungan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya bersama-sama dinas terkait (dprd-tasikmalaya, 7 Juni dan 7 Oktober, 2022).

Perbedaan juga diamini oleh Diki Zakaria sebagai Bendahara Bidang Keagamaan dan Ekonomi PMII Cabang Kota Tasikmalaya yang mengatakan bahwa “benar bahwa ada perbedaan cara gerak dua organisasi ini (HMI dan PMII)” lanjutnya “ perbedaan misalnya nampak pada saat penyikapan gerakan

dalam rangka menarik kader di Unsil, HMI dengan keterbukaannya dan PMII dengan senyapnya”<sup>7</sup>

Pada akhir Tahun 2022 Kota Tasikmalaya mengalami pergantian kepemimpinan akibat dari rencana Pilkada serentak 2024, Cheka Virgowansyah dipilih sebagai PJ. Wali Kota Tasikmalaya melalui mekanisme kementerian dalam negeri, menggantikan Muhammad Yusuf. Cheka Virgowansyah memimpin Kota Tasikmalaya dengan membawa banyak harapan, hal tersebut karena Cheka adalah bagian dari kementerian yang memiliki akses lebih cepat untuk menangani masalah Kota Tasikmalaya. Permasalahan Kota Tasikmalaya yang paling banyak menjadi sorotan adalah terkait dengan kemiskinan, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2021, Kota Tasikmalaya berada ditiga besar dengan angka kemiskinan 13,13%. Permasalahan terkait kemiskinan menjadi pusat perhatian dari banyak pihak salah satunya adalah Organisasi Mahasiswa Eksternal yaitu HMI dan PMII Cabang Kota Tasikmalaya.

HMI dan PMII Cabang Kota Tasikmalaya mengawal kebijakan dan program Cheka, salah satunya dengan melakukan gerakan sosial, seperti demonstrasi, audiensi, aksi simbolik dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena dalam kepemimpinan Cheka terlalu memfokuskan pada hal yang bersifat birokratis, sehingga harus ada pengingat oleh pihak-pihak seperti Mahasiswa agar kembali pada masalah yang lebih utama. Dalam praktik gerakan sosial yang dilakukan oleh HMI dan PMII Cabang Kota Tasikmalaya memiliki perbedaan

---

<sup>7</sup> Wawancara 1 September 2023



dalam memilih metode gerakan yang digunakan, yang dilandasi oleh dasar pemikiran masing-masing organisasi.

Selain perbedaan yang terjadi, peneliti juga menemukan persamaan mendasar pada dua organisasi tersebut, setidaknya ada tiga persamaan, yaitu; *pertama*, HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya memiliki asas ideologi yang sama yaitu Islam. Sebagai sesama organisasi mahasiswa yang berhaluan Islam tentu banyak persamaan dalam menjalankan organisasi hingga pada penyikapan isu-isu yang sedang berkembang, HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya yang berhaluan Islam juga memiliki basis massa yang sama yaitu mahasiswa yang menganut agama Islam; *kedua*, HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya berdiri pada tahun yang sama yaitu, 1962. HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya memulai langkah pertama sebagai sebuah organisasi mahasiswa pada tahun yang sama, artinya bahwa dua organisasi ini memiliki pengalaman yang sama di hampir sepanjang sejarah daerah Kota Tasikmalaya, dengan pengalaman sejarah dan usia yang sama, HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya memiliki cara pandang yang juga hampir serupa, seperti halnya teman sebaya yang saling memahami dengan asam garam yang sudah dilalui bersama; *ketiga*, HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya adalah dua organisasi yang rajin mencetak kader terbaik Tasikmalaya. Pembuktian dalam mencetak kader, memberikan gambaran kepada kita bahwa kaderisasi dalam dua organisasi ini memiliki irisan yang kental, terlihat dari bagaimana dua organisasi ini seakan berlomba dalam mencetak kader terbaiknya.

Berdasarkan temuan pra-penelitian dari berbagai sumber seperti literatur dengan adanya persamaan historis dan perbedaan pola gerakan kedua organisasi

dalam menyikapi isu yang berkembang, serta temuan wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung, maka peneliti mencoba untuk menggali lebih dalam tentang pola gerakan sosial organisasi tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada gerakan sosial yang dibangun pada pertengahan tahun 2023 yaitu demonstrasi HMI dan PMII kepada PJ Wali Kota Tasikmalaya Bapak Cheka Virgowansyah terkait dengan evaluasi 100 hari kepemimpinan Cheka, peneliti mengambil momentum ini karena dua organisasi ini bergerak pada waktu yang relatif berbeda namun pada satu tuntutan yang sama, sehingga peneliti dapat lebih mudah untuk melihat perbandingan gerakan sosial HMI dan PMII. Peneliti mengharapkan adanya hasil penelitian yang dapat membantu memberikan pandangan tentang perbandingan pola gerakan sosial HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements Theory*) dan Teori Orientasi Identitas (*Oriented Identity Theory*). Teori Gerakan Sosial Baru adalah pendekatan teoritis terbaru yang menjelaskan tentang perubahan karakter gerakan sosial. Gerakan Sosial Baru menekankan ciri khas gerakan sosial dalam perkembangan masyarakat pasca-industrial<sup>8</sup> di Amerika Utara dan Eropa Barat (Sukmana, 2016) .

Penelitian mengenai gerakan sosial pernah dikaji sebelumnya sebagai bahan referensi untuk penelitian ini, penelitian pertama dilakukan oleh Anna (2017) tentang Pola Gerakan Intelektual Mahasiswa, temuan dari skripsi adalah pola gerakan intelektual masing-masing organisasi berbeda, diantaranya adalah

---

<sup>8</sup>Menurut Daniel Bell Masyarakat pasca-industrial adalah masyarakat yang memusatkan pengetahuan teoritis sebagai inovasi dan pembentukan kebijaksanaan bagi masyarakat. (Fitri Utami, 2017).

tulisan, buku, pawai keliling, *knowledge sharing* melalui media sosial dan bentuk gerakan lainnya seperti gerakan menutup aurat yang dilakukan oleh LDK Salim. Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel yang diteliti fokus pada pola gerakan penelitian sementara penelitian ini akan fokus pada pola gerakan sosial HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya, di sisi lain penelitian Anna Fitriana meneliti banyak organisasi pada tingkat kampus sementara penelitian ini berfokus pada dua organisasi dalam hal ini HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya dengan tingkatan kota/kabupaten.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Tajul Arifin (2022) tentang Strategi Komunikasi Pengembangan Kaderisasi Organisasi Eksternal Mahasiswa temuan dari penelitian ini adalah Strategi komunikasi yang dilakukan PMII melalui sosialisasi, diskusi, dan stand pendaftaran, sementara HMI dengan Sosialisasi, diskusi, stand pendaftaran dan dilanjutkan dengan mengadakan seminar. Perbedaan antara penelitian Tajul Arifin dengan penelitian ini adalah variabel pembahasan yaitu penelitian Tajul fokus pada strategi komunikasi pengembangan kadernisasi antara HMI dan PMII di Universitas Math'ul Anwar Pandeglang, sementara penelitian ini berfokus pada latar belakang yang membentuk pola gerakan HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya, kemudian yang menjadi pembeda lainnya adalah lokasi penelitian, pada Skripsi Tajul Arifin hanya pada tingkatan Universitas sementara penelitian ini pada tingkatan kota atau cabang.

Kemudian penelitian yang dilakukan Muhammad Riza Chamadi dan Rifki Ahda Sumantri (2019) tentang Tipologi Gerakan Mahasiswa Melalui Organisasi

Islam Di Purwokerto. Sebagai temuan adalah tipologi gerakan mahasiswa Islam di Purwokerto terbagi atas gerakan Ideologis, Politik, Dakwah, akademis dan kewirausahaan, perbedaan antara penelitian Riza dan Rizki ini dengan penelitian ini adalah walaupun dari kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang gerakan mahasiswa tetapi penelitian Riza dan Rizki ini membahas tentang bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan oleh organisasi eksternal mahasiswa, sementara penelitian dalam tulisan ini berfokus pada latar belakang terjadinya pola gerakan antara HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan maka peneliti mencoba berupaya untuk melakukan pendalaman terkait hipotesa dan temuan-temuan peneliti. Penelitian ini pada dasarnya mencoba mengetahui apa yang menjadi latar belakang pola gerakan sosial terjadi dari mulai ideologi, taktik, partisipan hingga struktur dan membandingkan hasil penelitian tersebut hingga ditemukan perbedaan pola gerakan sosial antara HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya.. Dengan adanya hasil diakhir penelitian diharapkan menjadi informasi untuk mahasiswa umum, aktivis pergerakan dan orang-orang yang memiliki fokus pada ranah penelitian ini, hasil ini kemudian bisa menjadi bahan diskusi yang menarik dalam ruang-ruang berpikir khususnya di Tasikmalaya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Seperti Apakah Pola Gerakan Sosial Himpunan Mahasiswa Islam dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Tasikmalaya dalam Aksi Gerakan Evaluasi PJ. Wali Kota Tasikmalaya ?
2. Mengapa Pola Gerakan Sosial HMI dan PMII Cabang Kota Tasikmalaya Berbeda?
3. Bagaimana Dampak Gerakan Sosial yang dilakukan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui Bagaimana Pola Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kota Tasikmalaya dalam Aksi Gerakan Evaluasi PJ. Kota Tasikmalaya.
2. Mengetahui bagaimana Perbandingan Pola Gerakan antara HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya.
3. Mengetahui Bagaimana Dampak Gerakan Sosial yang dilakukan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki nilai manfaat bagi banyak pihak khususnya pada dunia akademis, diantara manfaat yang diharapkan yaitu :

#### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis diantaranya :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan studi ilmu politik, khususnya mengenai gerakan sosial dan mahasiswa.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dunia pergerakan dengan pengadopsian, koreksi, atau pengkombinasian dari hasil penelitian ini terhadap rencana-rencana pola gerakan mahasiswa.
3. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta penerapan secara teoritis pada gerakan mahasiswa Indonesia khususnya di Kota Tasikmalaya.

## **2. Secara Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan baik kepada kalangan Mahasiswa, aktivis gerakan, akademisi ataupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi terkait Gerakan Mahasiswa, alasan atau faktor yang menyebabkan pola gerakan terbentuk.
2. Diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pola gerakan yang dilakukan oleh HMI dan PMII Cabang Tasikmalaya kepada khalayak umum.
3. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada organisasi dalam mengembangkan serta meningkatkan arah gerak organisasi sehingga dapat memberikan dampak positif lainnya.